

LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 30 Maret 2015
Waktu	: Pukul 10.00 – 11.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas masalah Otonomi Daerah.
Ketua Rapat	: Dr. Wahidin Halim, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II
Sekretaris Rapat	: Minarni, S.H./Kabag.Set Komisi II DPR RI
Hadir	: 27 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. RDPU Komisi II DPR RI dengan Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan /Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 dibuka Pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh **Dr. Wahidin Halim, M.Si** dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan acara Audensi Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat terkait dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN AUDENSI :

- A. Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat, melalui Presidiumnya meminta konfirmasi langsung dari Komisi II DPR RI terkait tindak lanjut dari usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru di wilayahnya.

mekanisme pembahasan terhadap usulan pembentukan DOB Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (yang telah diubah yang Pemerintah Daerah).

III. KESIMPULAN:

Komisi II DPR RI memahami aspirasi Badan Persiapan Pembentukan Prov. Kep. Nias; Badan Koordinasi Pembentukan Kab. Cilangkahan Prov. Banten; dan Panitia Persiapan Pembentukan Kab. Garut Selatan Prov. Jawa Barat terkait dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru akan dijadikan sebagai bahan pembicaraan di dalam Rapat Intern Komisi II DPR RI yang akan datang yang kemudian akan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB.

Jakarta, 30 Maret 2015
Pimpinan Komisi II DPR RI
Wakil Ketua,

Ttd

Dr. Wahidin Halim, MSi
A-440